



Provinsi Kalbar

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jln. Parit H.Husein II Komplek Alex Griya Permai III Blok F No.1

Pontianak – Kalimantan Barat 78124

Telp : (0561) 574579 Faksimili : (0561) 574578

E-mail : bnnpkalbar@gmail.com

Pontianak, 24 Februari 2025

Kepada

Yth. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat

Di –

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : B / 144 / III/KA/KU.00/2025/BNNP

No	Jenis Surat yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan Dokumen Lampiran Laporan Keuangan Wilayah BNN Semseter II Tahun 2024 BNN Prov. Kalbar	1 Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk di proses lebih lanjut.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat



Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si

Tembusan :

1. Kepala BNN RI
2. Sestama BNN RI
3. Irtama BNN RI

**Laporan Keuangan Tahunan (Unaudited)
2024**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH
KALIMANTAN BARAT**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyusun dan menyampaikan LKKL (*Unaudited*) kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, Kementerian/Lembaga agar mengungkapkan secara memadai pos-pos komponen laporan keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai PMK Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan Penyusun LK dan penanda tangan Pernyataan Tanggung Jawab LK sesuai dengan PMK Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset Pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Serta Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PONTIANAK, 27 Februari 2025

Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat



Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si
NRP. 67040501

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Narkotia Nasional Wilayah Kalimantan Barat yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pontianak, 27 Februari 2025

KEPALA BNN PROV KALBAR

Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si

NIR 67040501



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN NARKOTIKA NASIONAL 066
UAPPAW : BA(066) ES1(01) KALIMANTAN BARAT 066011300KD

Tgl Data : 19/02/25 8:24 PM
Tgl Cetak : 21/02/25 4:03 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_uappaw_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	21,833,898,000	21,298,936,832	(534,961,168)	97.55	23,615,240,000	23,317,735,268	297,504,732	98.74
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
ESELON I : (01) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (066011300KD) BA(066) ES1(01) KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 21/02/25 12:23 PM

Tgl Cetak : 21/02/25 4:03 PM

Halaman : 1

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	667,000,001	625,820,001	41,180,000	-
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	667,000,001	625,820,001	41,180,000	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	667,000,001	625,820,001	41,180,000	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	5,100,033,802	4,740,510,234	359,523,568	-
Beban Persediaan	598,623,808	674,784,473	(76,160,665)	-
Beban Barang dan Jasa	10,777,332,340	11,818,177,077	(1,040,844,737)	-
Beban Pemeliharaan	1,561,415,135	1,232,866,545	328,548,590	-
Beban Perjalanan Dinas	3,221,194,591	4,399,995,298	(1,178,800,707)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT WILAYAH

PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 ESELON I : (01) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 WILAYAH/PROVINSI : (066011300KD) BA(066) ES1(01) KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 21/02/25 12:23 PM

Tgl Cetak : 21/02/25 4:03 PM

Halaman : 2

lap_lo_uappaw_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,280,717,216	1,808,430,898	(527,713,682)	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	22,539,316,892	24,674,764,525	(2,135,447,633)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(21,872,316,891)	(24,048,944,524)	2,176,627,633	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	1,199,000	762,000	437,000	-
Pendapatan Pelepasan Aset	3,626,000	1,402,000	2,224,000	-
Beban Pelepasan Aset	2,427,000	640,000	1,787,000	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(10,736,708)	9,100,683	(19,837,391)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	192	11,200,683	(11,200,491)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	10,736,900	2,100,000	8,636,900	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9,537,708)	9,862,683	(19,400,391)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(21,881,854,599)	(24,039,081,841)	2,157,227,242	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(21,881,854,599)	(24,039,081,841)	2,157,227,242	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT WILAYAH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN NARKOTIKA NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (066011300KD) BA(066) ES1(01) KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 21/02/25 12:23 PM

Tgl Cetak : 21/02/25 4:03 PM

Halaman : 1

lap_lpe_uappaw_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	20,941,630,442	22,349,219,899	(1,407,589,457)	(6.3)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(21,881,854,599)	(24,039,081,841)	2,157,227,242	(8.97)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(875,000)	(55,810,200)	54,935,200	(98.43)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(875,000)	(56,612,324)	55,737,324	(98.45)
LAIN-LAIN	0	802,124	(802,124)	(100)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	24,053,503,450	22,687,302,584	1,366,200,866	6.02
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2,170,773,851	(1,407,589,457)	3,578,363,308	(254.22)
EKUITAS AKHIR	23,112,404,293	20,941,630,442	2,170,773,851	10.37

Keterangan :

FINAL

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
UAPPAW : (066011300KD) BA(066) ES1(01) KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 21/02/25 12:23 PM

Tgl Cetak : 21/02/25 4:03 PM

Halaman : 1

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	21,530,900	(21,530,900)	(100.00)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	153,966,667	148,633,333	5,333,334	3.59
Persediaan	197,470,153	206,125,061	(8,654,908)	(4.20)
JUMLAH ASET LANCAR	351,436,820	376,289,294	(24,852,474)	(6.60)
ASET TETAP				
Tanah	15,452,608,736	15,145,089,569	307,519,167	2.03
Peralatan dan Mesin	33,176,342,326	32,018,092,583	1,158,249,743	3.62
Gedung dan Bangunan	5,455,264,387	3,993,140,000	1,462,124,387	36.62
Jalan, Irigasi dan Jaringan	483,002,014	0	483,002,014	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(31,802,873,888)	(30,579,481,372)	(1,223,392,516)	4.00
JUMLAH ASET TETAP	22,764,343,575	20,576,840,780	2,187,502,795	10.63
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	250,099,500	250,099,500	0	0.00
Aset Lain-lain	0	4,750,000	(4,750,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(228,310,200)	(218,534,000)	(9,776,200)	4.47
JUMLAH ASET LAINNYA	21,789,300	36,315,500	(14,526,200)	(40.00)
JUMLAH ASET	23,137,569,695	20,989,445,574	2,148,124,121	10.23
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	25,165,402	26,284,232	(1,118,830)	(4.26)
Uang Muka dari KPPN	0	21,530,900	(21,530,900)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25,165,402	47,815,132	(22,649,730)	(47.37)
JUMLAH KEWAJIBAN	25,165,402	47,815,132	(22,649,730)	(47.37)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	23,112,404,293	20,941,630,442	2,170,773,851	10.37
JUMLAH EKUITAS	23,112,404,293	20,941,630,442	2,170,773,851	10.37
JUMLAH EKUITAS	23,112,404,293	20,941,630,442	2,170,773,851	10.37
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23,137,569,695	20,989,445,574	2,148,124,121	10.23

NERACA
TINGKAT WILAYAH
PER 31 DESEMBER 2024 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (066) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN NARKOTIKA NASIONAL
UAPPAW : (066011300KD) BA(066) ES1(01) KALIMANTAN BARAT

Tgl Data : 21/02/25 12:23 PM

Tgl Cetak : 21/02/25 4:03 PM

Halaman : 2

lap_neraca_uappaw_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

BNN Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan Satuan Kerja Vertikal di bawah BNN RI sesuai dengan peraturan memiliki Rencana Program Kerja (RENPROJA) yang tertuang Dalam Rencana Program Kerja Tahun 2020-2024 yang berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga BNN RI Tahun 2020-2024. Dengan tujuan dijadikan pedoman dan arahan dalam melaksanakan program dan kegiatan BNN Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, guna mendukung Visi dan Misi BNN RI Tahun 2020-2024

Badan Narkotika Nasional menetapkan rencana kerja tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja

A. Program Dukungan Manajemen Tehknis

Target Kinerja BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN sebagai Indikator kegiatan adalah nilai kinerja Anggaran dengan kategori "baik" (NKA sebesar 80 dan jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)

2. Kegiatan Pembinaan dan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan Indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori "sangat baik" (IKPA sebesar 97.79 dan jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)

B. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)

Indikator Program P4GN adalah sebagai berikut:

- Jumlah Jaringan diungkap
- Persentase Penyelesaian asset TPPU tersangka Narkotika
- Indeks Ketahanan Diri dan Keluarga
- Indeks Kota Tanggap
- Indeks Kemandirian Masyarakat
- Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu: pemberantasan, pencegahan, dayamas dan rehabilitasi.

Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

1. Pemberantasan

Indikator kinerja dalam Program P4GN bidang Pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap, berkas perkara tindak pidana narkotika yang terselesaikan, dan penyelesaian perkara TPPU tersangka narkotika. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan di antaranya adalah;

- Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan Indikator Kegiatan adalah kegiatan jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target 1 peta jaringan
- Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah jumlah berkas tindak Pidana Narkotika yang P-21 dengan besar target 8 Berkas Perkara.
- Kegiatan Penyidikan TPPU dengan Indikator kegiatan, jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 dengan besar target 1 Perkara.
- Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua Indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan tahanan dengan besar target 100 % dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika dengan besar target 100 %.

2) Pencegahan

Indikator Program Pencegahan adalah Indeks Ketahanan Diri Remaja dan Ketahanan Keluarga. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan Indikator Kegiatan jumlah Kabupaten / Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja kategori tinggi sebanyak 5 Kabupaten/Kota dengan masing-masing BNNK mendapatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja di atas 78,70
- Kegiatan Advokasi dengan Indikator Kegiatan Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan kategori tinggi sebanyak 5 Kabupaten/Kota dengan masing-masing BNNK mendapatkan Indeks Ketahanan Keluarga di atas 52,5.

3) Dayamas

Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat adalah Kota Tanggap Darurat, dengan besar target 7 Kabupaten/Kota yang teridentifikasi sangat tanggap Narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan Indikator Kegiatan adalah Kabupaten/Kota dengan Indeks Kemandirian Masyarakat berkategori tinggi, dengan besar target 7 Kabupaten/Kota dengan masing-masing BNNK mendapatkan Indeks Kemandirian Partisipatif di atas 3,5.
- Kegiatan Pemberdayaan Alternatif dengan Indikator kegiatan Status Keterpulihan kawasan Rawan dari "bahaya" menjadi "waspada", dengan besar target 1 kawasan bahaya dan Indikator Kegiatan Nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan, dengan besar target 2,9 (BNNP Kalimantan Barat).

4) Rehabilitasi

Indikator Program Rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi yang memenuhi SPM dengan besat target dan kedua persentase rehab pulih. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (Penguatan) Fasilitas Rehabilitasi. Dengan Indikator kegiatan yang pertama, jumlah Lembaga Rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target 4 Lembaga, kedua jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat dengan besar target 16 Unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petugas Rehabilitasi dengan Indikator Kegiatan Jumlah Petugas Lembaga Rehabilitasi yang tersertifikasi Kompetensi Teknis Layanan Rehabilitasi dengan besar target 10 orang dan jumlah Petugas Unit Penyelenggara Layanan IBM yang terlatih dengan besar target 80 orang
- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan Indikator Kegiatan Indeks Mutu Layanan Rehabilitasi dengan besar target 3,3.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL yang merupakan entitas pelaporan dari BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya ...
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	742.400.000	742.400.000
Jumlah Pendapatan	742.400.000	742.400.000
Belanja		
Belanja Pegawai	5.359.116.000	5.359.116.000
Belanja Barang	16.442.627.000	16.442.627.000
Belanja Modal	32.155.000	32.155.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	21.833.898.000	21.833.898.000

Realisasi Pendapatan
Rp670.626.193

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp670.626.193 atau mencapai 90,33 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp742.400.000. Pendapatan BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp670.626.193. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya Kenaikan pada Periode Pelaporan ini karena: peningkatan total Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pengembalian selisih belanja Pegawai (51)

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	742.400.000	670.626.193	90,33
Jumlah	742.400.000	670.626.193	90,33

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 5,04 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	670.626.193	638.422.684	5,04
Jumlah	670.626.193	638.422.684	5,04

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp670.626.193

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp670.626.193 dan Rp638.422.684. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,04 dari TA 2023 Kenaikan karena: Pendapatan Negara Bukan Pajak, Pengembalian selisih belanja Pegawai (51) karena pembulatan dari Penerimaan Lelang

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	670.626.193	638.422.684	5,04
Jumlah	670.626.193	638.422.684	5,04

Sedangkan Rincian PNPB Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNPB Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Jasa Lainnya	667.000.000	625.820.000	6,58
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	192	11.200.683	(100,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.626.000	1.402.000	158,63
	-	-	-
Jumlah	670.626.193	638.422.684	5,04

B.2 Belanja

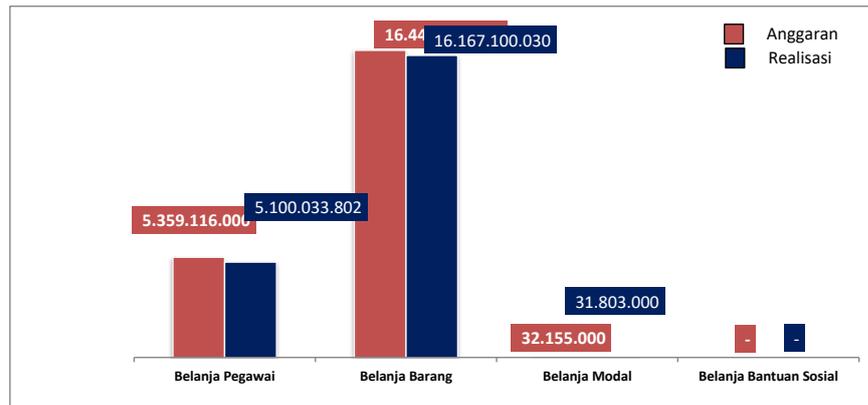
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp21.298.936.832 atau 97,55 % dari anggaran belanja sebesar Rp.21.833.898.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	5.359.116.000	5.100.033.802	95,17
Belanja Barang	16.442.627.000	16.167.100.030	98,32
Belanja Modal	32.155.000	31.803.000	98,91
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	21.833.898.000	21.298.936.832	97,55

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar 8,66%. Tidak ada signifikansi dalam realisasi belanja 52, sedangkan untuk belanja 53 hanya terdapat pada 3 satuan kerja, yaitu: BNN Provinsi Kalimantan Barat, BNN Kabupaten Kubu Raya dan BNN Kabupaten Sintang

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	5.100.033.802	4.765.471.234	7,02
Belanja Barang	16.167.100.030	18.081.814.034	(10,59)
Belanja Modal	31.803.000	470.450.000	(93,24)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	21.298.936.832	23.317.735.268	(8,66)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.100.033.802 dan Rp4.765.471.234. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,02 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Bertambahnya jumlah personil ASN pada BNN Wil. Kalbar berimplikasi pada peningkatan gaji pokok, dan tunjangan fungsional dll disesuaikan dengan Peraturan dan adanya pengembalian Belanja Pegawai dari Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunj. Fungsional PNS dan Belanja Tunjangan Umum PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.493.077.200	3.190.137.360	9,50
Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.878	57.435	(4,45)
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	201.364.520	186.657.180	7,88
Belanja Tunj. Anak PNS	65.826.970	61.130.154	7,68
Belanja Tunj. Struktural PNS	241.520.000	253.220.000	(4,62)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	281.212.000	249.820.000	12,57
Belanja Tunj. PPh PNS	38.243.209	16.238.620	135,51
Belanja Tunj. Beras PNS	166.566.000	170.259.420	(2,17)
Belanja Uang Makan PNS	542.936.000	550.558.000	(1,38)
Belanja Tunjangan Umum PNS	72.010.000	93.930.000	(23,34)
Jumlah Belanja kotor	5.102.810.777	4.772.008.169	6,93
Pengembalian Belanja Pegawai	2.776.975	6.536.935	(57,52)
Jumlah Belanja	5.100.033.802	4.765.471.234	7,02

Realisasi Belanja
Barang
Rp16.167.100.030

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.167.100.030 dan Rp18.081.814.034. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan sebesar 10,59% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Penurunan realisasi Belanja barang/jasa disebabkan penyesuaian kebijakan Pemerintah melalui BLOKIR automatic adjustment dan efisiensi belanja Perjalanan Dinas dan adanya Pengembalian Belanja untuk Belanja Bahan, Belanja Langganan Listrik, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	5.893.338.828	6.293.586.780	(6,36)
Belanja Barang Non Operasional	1.567.474.227	1.854.566.698	(15,48)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	600.850.800	635.915.947	(5,51)
Belanja Jasa	3.324.663.099	3.665.522.766	(9,30)
Belanja Pemeliharaan	1.561.270.135	1.232.626.545	26,66
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.222.134.591	4.399.995.298	(26,77)
Jumlah Belanja Kotor	16.169.731.680	18.082.214.034	(10,58)
Pengembalian Belanja	2.631.650	400.000	557,91
Jumlah Belanja	16.167.100.030	18.081.814.034	(10,59)

Realisasi Belanja Modal
Rp31.803.000

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp31.803.000 dan Rp470.450.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 93,24% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh BNN Wilayah Kalimantan Barat merealisasikan pengadaan Peralatan dan Mesin: Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Khusus Kepolisian, Komputer Unit dan Peralatan Komputer;.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.803.000	371.450.000	(91,44)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	99.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	31.803.000	470.450.000	(93,24)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	31.803.000	470.450.000	(93,24)

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp31.803.000

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp31.803.000 dan Rp371.450.000, mengalami penurunan sebesar 89,97 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh Pada TA 2024 adanya transaksi pembelian Peralatan dan Mesin: Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Khusus Kepolisian, Komputer Unit dan Peralatan Komputer;.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.803.000	316.950.000	(89,97)
Jumlah Belanja Kotor	31.803.000	316.950.000	(89,97)
Jumlah Belanja	31.803.000	316.950.000	(89,97)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp99.000.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari - Tidak ada Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan sampai pada periode Pelaporan..

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	99.000.000	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	-	99.000.000	(100,00)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	99.000.000	(100,00)

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Capaian Output sesuai dengan realisasi anggaran periode 31 Desember 2024 dijelaskan pada lampiran Catatan lainnya.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp667.000.001

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp667.000.001 dan Rp625.820.001. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 6,58. Hal tersebut disebabkan oleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Layanan SKHPN yaitu masing-masing klinik Pratama BNN Provinsi dan BNN Kab/Kota menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika kepada

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Jasa Lainnya	667.000.000	625.820.000,00	6,58
Jumlah	667.000.001,00	625.820.001,00	6,58

Beban Pegawai
Rp5.100.033.802

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.100.033.802 dan Rp4.740.510.234.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 7,58 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Bertambahnya jumlah personil ASN (mutasi masuk) pada BNN Wil. Kalbar berimplikasi pada peningkatan gaji pokok, tunjangan fungsional dan tunjangan uang makan. Selain adanya Peraturan perihal Kenaikan besaran tunjangan personil. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.493.077.200	3.190.137.360	9,50
Beban Pembulatan Gaji PNS	52.903	57.300	(7,67)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	201.364.520	186.657.180	7,88
Beban Tunj. Anak PNS	65.826.970	61.130.154	7,68
Beban Tunj. Struktural PNS	241.520.000	253.220.000	(4,62)
Beban Tunj. Fungsional PNS	280.842.000	249.820.000	12,42
Beban Tunj. PPh PNS	38.243.209	16.238.620	135,51
Jumlah	5.100.033.802	4.740.510.234	7,58

Beban Persediaan
Rp598.623.808

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp598.623.808 dan Rp674.784.473

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan karena realisasi belanja barang persediaan menurun pada periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	591.779.107	673.964.169	(12,19)
Beban Persediaan amunisi	6.844.701	820.304	734,41
Jumlah Beban Persediaan	598.623.808,00	674.784.473	(11,29)

Beban Barang dan Jasa
Rp10.777.332.340

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.777.332.340 dan Rp11.818.177.077.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,81 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan disebabkan karena realisasi belanja Barang/Jasa pada periode pelaporan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	4.237.123.878	4.238.251.365	(0,03)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.482.200	2.905.415	(14,57)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.620.512.750	1.990.206.000	(18,58)
Beban Barang Operasional Lainnya	33.220.000	62.224.000	(46,61)
Beban Bahan	1.083.292.227	1.144.600.200	(5,36)
Beban Honor Output Kegiatan	92.090.000	103.650.000	(11,15)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	375.942.000	598.416.498	(37,18)
Beban Langganan Listrik	373.182.803	369.147.774	1,09
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	14.475.000	7.500.000	93,00
Jumlah	10.777.332.340	11.818.177.077,00	(8,81)

Beban Pemeliharaan
Rp1.561.415.135

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.561.415.135 dan Rp1.232.866.545.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 26,65 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Kenaikan karena realisasi belanja Pemeliharaan Aset Tetap meningkat pada periode Pelaporan dibandingkan dengan

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	240.585.725	140.971.000	70,66
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.320.684.410	1.091.655.545	20,98
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	145.000	240.000	(39,58)
Jumlah	1.561.415.135	1.232.866.545	26,65

Beban Perjalanan Dinas
Rp3.221.194.591

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.221.194.591 dan Rp4.399.995.298

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 26,79 persen disebabkan oleh Penurunan dikarenakan realisasi Belanja perjalanan Dinas pada

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	1.694.837.405	2.682.135.050	(36,81)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	290.079.000	401.560.000	(27,76)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.148.418.000	1.316.300.248	(12,75)
Jumlah	3.221.194.591,00	4.399.995.298	(26,79)

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.280.717.216

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.280.717.216 dan Rp1.808.430.898.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.145.263.154	1.705.724.966	(32,86)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	103.427.094	88.179.732	17,29
Beban Amortisasi Lisensi	14.526.200	14.526.200	-
Jumlah Penyusutan	1.280.717.216	1.808.430.898	(29,18)
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	1.280.717.216	1.808.430.898	(29,18)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp1.199.000

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.199.000 dan Rp762.000

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.626.000	1.402.000,00	159
Jumlah	1.199.000,00	762.000	57

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp-
10.736.708

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-10.736.708 dan Rp9.100.683.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(10.736.900)	(2.100.000,00)	411,28
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	192	11.200.683,00	(100,00)
Jumlah	(10.736.708,00)	9.100.683	(217,98)

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

Perbedaan Beban Barang dan Jasa pada LO dan LRA sebesar -Rp. 2.356.387 yang disebabkan karena ada jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode pelaporan untuk belanja Beban Sewa yang masih menjadi hak dan beban jasa langganan yang masih merupakan kewajiban yang harus dibayar.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp20.941.630.442,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.20.941.630.442,00 dan Rp.22.349.219.899,00

Defisit LO
Rp21.881.854.599,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.21.881.854.599,00 dan Rp.24.039.081.841,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp24.053.503.450

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.24.053.503.450 dan Rp.22.687.302.584. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	21.298.936.832
Diterima dari Entitas Lain	(670.626.193)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	16.082.500
Pengesahan Hibah Langsung	3.409.110.311
Jumlah	24.053.503.450

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 21.298.936.832, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 670.626.193

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp16.082.500 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Kode Barang: 132111-Peralatan dan Mesin 3.05.01.05.017 Alat Kantor: Mesin Absensi	Biro Umum Logistik Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional RI kepada BNN Kabupaten Kubu Raya.	8.500.000
Kode Barang: 132111-Peralatan dan Mesin 3.05.01.05.17 Alat Kantor: Mesin Absensi	Biro Umum Logistik Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional RI kepada BNN Kota Pontianak	8.425.000
Jumlah		16.925.000

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	TANAH DAN BANGUNAN	2.252.646.568
PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	KENDARAAN RODA 2 DAN RODA 4	1.156.464.743,71
-	-	-
Total Pengesahan		3.409.111.311,44
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		3.409.111.311

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

Ekuitas Akhir
Rp23.112.404.293

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.23.112.404.293,00 dan Rp.20.940.828.318,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Tidak ada

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	21.530.900	-
Jumlah	21.530.900	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Pengungkapan Kas di Bendahara Pengeluaran, berupa: Total Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran BNN Kabupaten Sintang (419249) yang belum disetor sampai pada tanggal 29 Desember 2023. Jumlah UP ini dihitung dari total UP awal yang disetujui oleh KPPN dikurangi dengan total SPM/SP2D GUP Nihil.

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

Tidak ada Kas pada Bendahara Penerimaan karena setoran PNPB SKHPN langsung disetor dengan menggunakan id billing ke bank.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp0

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Kas Lainnya dan Setara Kas	888.250,00	-
Jumlah	888.250	-

Penjelasan tentang Kas Lainnya dan Setara Kas :

Terdapat uang tunai L/S Bendahara atas belanja Jasa Honorarium Petugas SKHPN sebanyak 11 klien @Rp.85.000,- dipotong PPh 21 (5%) yg sudah terbit SPM/SP2D. Oleh BPG BNN Kabupaten Sanggau belum dibayarkan kepada penerima sampai pada periode Pelaporan.

Belanja Dibayar Dimuka
(prepaid)
Rp153.966.667

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp153.966.667 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	153.966.667,00	-
Jumlah	153.966.667	-

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Transaksi Sewa Rumah Dinas Jabatan Kepala BNNP Kalbar dan Sewa Kantor BNNP Kalbar dan Sewa Kantor BNN Kabupaten Mempawah yang perikatannya sampai dengan jatuh tempo TA 2025, masih merupakan hak.

Persediaan
Rp197.470.153

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp197.470.153 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	107.336.000	-
Amunisi	90.134.153	-
Jumlah	197.470.153	-

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi Persediaan, berupa: Barang Komsumsi, Amunisi dan Bahan untuk Pemeliharaan dalam kondisi baik, berdasarkan hasil Pemeriksaan Stock Opname dan sudah dibukukan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 untuk masing-masing UAKPA & UAKPB tingkat Satuan Kerja: 1 BNNP dan 7 BNNK.

Tanah
Rp15.452.608.736

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp15.452.608.736 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut Hibah Langsung bentuk Barang, berupa: Tanah Kantor Bangunan/Gedung BNN Kabupaten Sambas.. Mutasi nilai

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah :	
Hibah (Masuk)	307.519.167
Mutasi kurang :	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	307.519.167

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	6819 M2	Desa Lembong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas	307.519.167
Jumlah			307.519.167

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tidak ada Tanah yang dikuasai/digunakan oleh Pihak ketiga.-

Peralatan dan Mesin
Rp33.176.342.326

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp33.176.342.326 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Pembelian	31.803.000
Transfer Masuk	16.925.000
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	1.785.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(31.101.114.228)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(31.099.329.228)

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- BNN Wilayah Kalimantan Barat pada Periode bulan 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024 terdapat Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin dari transaksi Pembelian (alat kantor: Layar Infocus) dan transaksi Transfer Masuk (Alat Kantor: Mesin Finger Print/Absensi untuk BNN Kab. Kubu Raya) dari BNN RI. Dan adanya transaksi Reklasifikasi masuk dan Penggunaan kembali

Gedung dan Bangunan
Rp5.455.264.387

C.27 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.455.264.387 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	1.462.124.387
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2024	1.462.124.387
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(684.258.892)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	777.865.495

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Hibah Langsung bentuk Barang berupa: 1 Unit Bangunan Gedung/Bangunan Kantor BNN Kabupaten Sambas dan 2 Unit Bangunan Rumah Dinas Jabatan.

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp483.002.014

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.483.002.014 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Hibah (Masuk)	483.002.014
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	483.002.014
Akumulasi Penyusutan s.d.	(17.500.768)
Nilai Buku per	465.501.246

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Hibah Langsung bentuk barang berupa: Jalan akses masuk dan jalan akses keluar serta jaringan saluran air bersih.

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Tidak Ada.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp31.802.873.888

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp31.802.873.888 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	33.176.342.326	(31.101.114.228)	2.075.228.098
2	Gedung dan Bangunan	5.455.264.387	(684.258.892)	4.771.005.495
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	483.002.014	(17.500.768)	465.501.246
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		39.114.608.727	(31.802.873.888)	7.311.734.839

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp250.099.500

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp250.099.500 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada BADAN NARKOTIKA NASIONAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT berupa Aset Tak Berwujud terdiri atas: Software dan Lisensi pada alat-alat intelijen yang digunakan dalam pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (TPN)..

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(228.310.200)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(228.310.200)

Aset Lain-lain Rp0

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	2.250.000
Saldo per 31 Desember 2024	(2.250.000)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	(2.250.000)

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Tidak ada

Mutasi Kurang

- Transaksi Reklas keluar dari Aset Lainnya ke Aset tetap sebagai dampak dari Penggunaan kembali aset yang telah dihentikan penggunaannya sebelumnya.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 228.310.200

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp228.310.200 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	250.099.500	(228.310.200)	21.789.300
Aset Lain-lain	-	-	-
	-	-	-
Total	250.099.500	(228.310.200)	21.789.300

Utang kepada Pihak Ketiga Rp25.165.402

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp25.165.402 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	25.165.402	-
	-	-
Total	25.165.402	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Belanja Barang yang masih harus dibayar, terdiri atas: Belanja Beban tagihan langganan Air, Beban Tagihan Langganan Telepon dan Internet bulan Desember 2024 yang tagihannya timbul pada tanggal 5 Januari 2025 dan besaran tagihan-tagihan tersebut dibayarkan menggunakan anggaran DIPA TA 2025;

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Utang yang belum diterima tagihannya timbul sebagai akibat tertundanya pembayaran (SPM/SP2D) dari BAST untuk belanja Pengadaan Barang/Jasa yang sudah ada dan tercatat pada modul komitmen (pada 2 periode bulan yang berbeda). Antara lain: transaksi belanja yang menghasilkan BMN, mekanisme penyelesaian tagihan GUP, Pembayaran Gaji Non Kontraktual dan Belanja Pengadaan Barang Modal

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Pengungkapan Total Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Badan Narkotika Nasional Wilayah Kalimantan Barat, terdiri atas: 8 Satuan Kerja yang terdaftar dan disahkan oleh 3 KPPN sesuai daerah kerja masing-masing dibawah naungan Kanwil DJPb Kalimantan Barat.

Ekuitas
Rp23.112.404.293

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.112.404.293. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Utang kepada Pihak ke-3 Lainnya, berupa: **Belanja Beban yang masih harus dibayar (AKRUAL)** untuk transaksi Belanja Tagihan Langganan Listrik, Air dan Telepon Internet bulan Desember 2024 yang akan dibayarkan pada bulan Januari menggunakan pagu anggaran tahun 2025. Serta Sewa Dibayar di Muka (DEFERRAL) untuk Sewa Gedung Kantor BNN Provinsi Kalimantan, BNN Kab Mempawah, BNN Kab. Kubu Raya, BNN Kab. Bengkayang dan Sewa Rumah Dinas Jabatan Eselon II Kepala BNN Provinsi Kalimantan Barat dan BNN Kota/ Kabupaten yang berdomisili dari luar Wilayah Kalbar. Masa kontrak yang melewati tanggal Neraca periode 31 Desember 2024, menimbulkan **hak yang masih harus diterima** sampai dengan periode T.A. 2025 sesuai dengan perikatan hingga masa kontrak/sewa tersebut selesai.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pengungkapan lain-lain menyajikan Laporan Kinerja dalam mencapai target Capaian Output dari 8 Satuan kerja dan kegiatan Prioritas Nasional dalam ruang lingkup wilayah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan periode 31 Desember Tahun Anggaran 2024. Disajikan pada halaman berikutnya;

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3251.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat						Laporan		
01 BKA.002	Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Unit Vertikal)	150.000.000	149.265.200	99,51%	3	3	Laporan	90,20%	
3256	<i>Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba</i>								
1. 01	Indeks Kapabilitas Rehabilitasi								
2. 01	Persentase peningkatan kualitas Hidup Klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi Berkelanjutan								
3. 02	Indeks kepuasan layanan rehabilitasi narkotika								
3256.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat						Orang, Akta, Keping, Bidang		
01 BAA.001	Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	53.675.000	46.430.000	86,50%	130	112	Orang	86,15%	
3257	<i>Pemberdayaan Peran serta Masyarakat</i>								
1. 01	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)								
3257.QDB	<i>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</i>						Lembaga, Unit Kerja, Tim		
01 QDB.001	<i>Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (PN)</i>	1.492.693.000	1.485.026.186	99,49%	16	16	Lembaga	100,00%	
3258	<i>Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti</i>								
1. 01	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan								
2. 02	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika								
3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat						Orang, Akta, Keping, Bidang		
01 BAA.002	Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	68.075.000	60.760.000	89,25%	27	60	Orang	222,22%	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3258.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk						Produk, Laporan, Keputusan		
01 BIA.002	Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba (unit Vertikal)	47.267.000	47.165.800	99,79%	2	2	Produk	100,00%	
3258.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat						Orang, Laporan		
01 BIB.002	Layanan Pengawasan dan Perawatan Tahanan Tindak Pidana Narkoba, Prekursor Narkoba dan TPPU (Unit Vertikal)	57.183.000	56.235.000	98,34%	16	10	Orang	62,50%	
3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah								
1. 01	Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis								
2. 02	Petugas Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terlatih								
3259.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM						Orang		
01 PDG.001	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi (PN)	128.430.000	128.428.000	100,00%	80	80	Orang	100,00%	
3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat								
1. 01	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi								
2. 02	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi								
3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat						Orang, Akta, Keping, Bidang		
01 BAA.002	Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	177.037.000	161.445.527	91,19%	175	240	Orang	137,14%	
02 BAA.003	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	593.920.000	502.571.000	84,62%	2560	2281	Orang	89,10%	
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						Lembaga, Unit Kerja, Tim		
01 BDB.001	Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	27.928.000	25.708.000	92,05%	26	26	Lembaga	100,00%	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						Lembaga, Unit Kerja, Tim		
01 QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional (PN)	387.803.000	368.223.950	94,95%	16	15	Lembaga	93,75%	
5354	<i>Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika</i>								
1. 01	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21								
2. 02	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan								
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan						Perkara, Berkas Perkara		
01 BCA.002	Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	500.000.000	496.163.352	99,23%	8	10	Perkara	125,00%	
5936	<i>Pengelolaan Informasi dan Edukasi</i>								
1. 01	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja								
5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						Lembaga, Unit Kerja, Tim		
01 QDB.001	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan SoftSkill (PN)	172.540.000	169.038.000	97,97%	2	2	Lembaga	100,00%	
5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga						Lembaga, Unit Kerja, Tim		
01 QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk (PN)	493.600.000	493.242.600	99,93%	70	88	Lembaga	125,71%	
066.01.WA	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	16.596.923.000	16.245.091.967	97,88%	-	-		-	-
3236	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</i>								
1. 01	Nilai kualitas laporan keuangan Satuan Kerja								
2. 02	Indeks Kepatuhan Pembayaran Belanja Pegawai								
3236.EBA	<i>Layanan Dukungan Manajemen Internal</i>						Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
01 EBA.994	Layanan Perkantoran	5.817.646.000	5.554.887.305	95,48%	96	64	Layanan	66,67%	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal						Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
01 EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	28.456.000	27.660.700	97,21%	16	16	Dokumen	100,00%	
3237	Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia								
1. 01	Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian (skala 4)								
2. 02	Persentase penilaian atas efektivitas penataan tatalaksana								
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal						Orang, Layanan, Rekomendasi		
01 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	77.460.000	74.587.200	96,29%	8	8	Layanan	100,00%	
3238	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program & Anggaran BNN								
3238.EBD	Layanan Manajemen SDM Internal						Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
01 EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	33.770.000	27.726.800	82,10%	16	16	Dokumen	100,00%	
02 EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	48.133.000	40.285.000	83,70%	16	16	Dokumen	100,00%	
3239	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana								
1. 01	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Ketatausahaan								
2. 02	Indeks Kualitas Pengadaan dan Pengelolaan Barang/Jasa								
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
01 EBA.962	Layanan Umum	1.099.177.000	1.098.103.710	99,90%	8	8	Layanan	100,00%	
02 EBA.994	Layanan Perkantoran	9.369.751.000	9.306.205.252	99,32%	96	96	Layanan	100,00%	
03 EBB.951	Layanan Sarana Internal	46.630.000	46.278.000	99,25%	31	31	Unit	100,00%	

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3979	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan								
1. 01	Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan								
2. 02	Presentase Tingkat Kepuasan Layanan Protokoler								
3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal						Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
01 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	75.900.000	69.358.000	91,38%	8	8	Layanan	100,00%	
	Subtotal	21.833.898.000	21.304.344.857	97,57%					
	Penyesuaian								
	-Revisi DIPA	-	-	-	Kebijakan Automac Adjustment untuk semua Satuan Kerja Kewilayahan sesuai dengan Surat Kepala BNN RI				
	-Pengembalian Belanja	-	-5.408.625	-	Pengembalian Belanja pada Satker Wilayah: BNN Kota Pontianak, BNN Kota Singkawang, BNN Kabupaten Sanggau dan BNN Kabupaten Sintang sebagai pertanggungjawaban dalam menindaklanjuti Temuan Audit JFA Inspektorat BNN RI tahun anggaran 2025				
	Total	21.833.898.000	21.298.936.232	97,55%					

Prioritas Nasional VII- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 Program Prioritas, 5 Kegiatan Prioritas, yang tersebar di 8 satuan kerja dengan pagu mencapai **Rp. 3.495.890.000,-** Dan realisasi sebesar **Rp. 3.455.162.136,-** dengan rincian sebagai berikut:

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas		Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	3247	Penyelenggaraan Advokasi							
	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga							
	1. 01	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Faktor Risiko Penyalahgunaan Narkoba				KK, Keluarga			
	01 QDE.002	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba (PN)	315.860.000	315.273.400	99,81%	Keluarga	40	1	2,50%
	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa				Desa, DesaKelurahan			
	01 UBB.001	Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa (PN)	504.964.000	495.930.000	98,21%	Desa	16	19	118,75%
	3257	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat							
	1. 01	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)							
	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				Lembaga, Unit Kerja, Tim			
	01 QDB.001	Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (PN)	1.492.693.000	1.485.026.186	99,49%	Lembaga	16	16	100,00%
	3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah							
	1. 01	Petugas Rehabilitasi yang Tersertifikasi Kompetensi Teknis							
	2. 02	Petugas Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terlatih							
	3259.PDG	Standarisasi Profesi dan SDM				Orang			
	01 PDG.001	Agen Pemulihan yang Dilatih Kompetensi Teknis Rehabilitasi (PN)	128.430.000	128.428.000	100,00%	Orang	80	80	100,00%
	3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat							
	1. 01	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi							
	2. 02	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi							
	3260.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				Lembaga, Unit Kerja, Tim			
	01 QDB.001	Unit Intervensi Berbasis Masyarakat yang Operasional (PN)	387.803.000	368.223.950	94,95%	Lembaga	16	15	93,75%
5936	Pengelolaan Informasi dan Edukasi								
1. 01	Indeks Ketahanan Diri Anak dan Remaja								

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas		Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
	5936.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				Lembaga, Unit Kerja, Tim			
	01 QDB.001	SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan SoftSkill (PN)	172.540.000	169.038.000	97,97%	Lembaga	2	2	100,00%
	5936.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				Lembaga, Unit Kerja, Tim			
	01 QDC.001	Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk (PN)	493.600.000	493.242.600	99,93%	Lembaga	70	88	125,71%
TOTAL			3.495.890.000	3.455.162.136	98,83%				